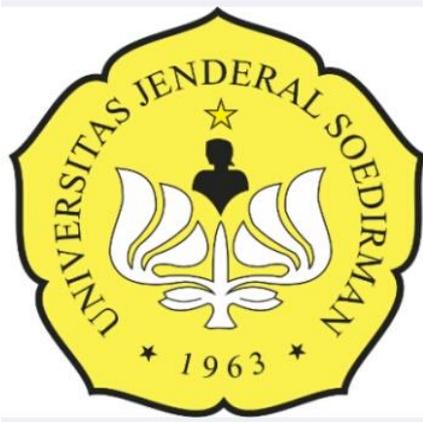


**PANDUAN AKADEMIK
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
(KURIKULUM 2021)**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
2021**

I. PROFIL DAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kurikulum 2021 didesain untuk menghasilkan profil lulusan sarjana yang mempunyai keahlian dan kompetensi sebagai ***analisis sosial politik, penyelenggara pemilu, peneliti, organisatoris organisasi publik, analisis kebijakan, dan wirausaha sosial dan politik***. Kurikulum 2021 Program Studi S1 Ilmu Politik dirancang untuk menghasilkan lulusan sarjana yang memiliki sikap dan kemampuan unjuk kerja sebagai berikut:

1. Aspek Sikap:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. Aspek Keterampilan Umum:

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- 4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- 6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;

- 7) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- 8) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- 9) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Kurikulum 2021 juga dirancang agar lulusan Sarjana Ilmu Politik menguasai pengetahuan dan kompetensi khusus sebagai berikut:

3. Aspek Pengetahuan:

- 1) Menguasai konsep umum tentang kekuasaan dan menguasai secara mendalam teori politik klasik dan kontemporer tentang kekuasaan dan relasi kekuasaan antarkelompok sosial dalam berbagai bentuk dan manifestasinya;
- 2) Menguasai secara mendalam satu atau beberapa konsep dan teori tentang perilaku politik;
- 3) Menguasai secara mendalam satu atau beberapa konsep dan teori tentang kebijakan publik;
- 4) Menguasai analisis historis dan kontekstual tentang politik Indonesia;
- 5) Menguasai secara umum metode penelitian sosial dan menguasai secara mendalam salah satu metode penelitian politik, yaitu metode kuantitatif atau kualitatif;
- 6) Menguasai konsep umum dan perspektif teoretis tentang ekonomi politik dan menguasai secara mendalam pendekatan ekonomi politik untuk analisis politik kontemporer;
- 7) Menguasai konsep umum dan perspektif teoretis tentang perbandingan politik dan menguasai secara mendalam salah satu teori atau metode untuk analisis perbandingan politik.

4. Aspek Keterampilan Khusus

- 1) Mampu memformulasikan program pemberdayaan dan pengembangan kemitraan masyarakat desa;
- 2) Mampu membuat kajian tentang masalah sosial dan politik yang aktual dan menyajikannya di berbagai format media;
- 3) Mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi tata kelola partai politik dan peraturan-peraturan teknis pelaksanaan semua tahapan pemilu;
- 4) Mampu melakukan penelitian sosial-politik dan mempublikasikannya;
- 5) Membuat *policy brief* sederhana;
- 6) Mampu memetakan permasalahan prosedural dan memformulasikan inisiatif kewirausahaan sosial dan politik;
- 7) Mampu memanfaatkan referensi politik berbahasa Inggris secara aktif.

II. BEBAN STUDI

Kurikulum baru Jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed terdiri dari 75 Mata Kuliah (MK) yang terbagi dalam 6 (enam) MK Universitas dengan Kode UNO, 3 (tiga) MK Fakultas dengan Kode SPO, dan 66 MK Jurusan dengan Kode SPP. Kurikulum baru dirancang untuk dapat diselesaikan dalam waktu antara 7-8 semester dengan batas maksimal masa studi adalah 14 semester atau selama 7 (tujuh) tahun. Untuk dapat lulus dan mendapatkan gelar sarjana S1, mahasiswa wajib mengambil minimal 144 SKS yang terdiri dari:

Jenis Mata Kuliah	MK	SKS
Mata Kuliah Wajib Universitas (UNO)	6	13
Mata Kuliah Wajib Fakultas (SPO)	3	12
Mata Kuliah Wajib Jurusan (SPP)	29	80
Mata Kuliah Pilihan (SPP)	13	39
T o t a l	51	144

III. METODE DAN BENTUK PEMBELAJARAN

Metode pembelajaran yang dipakai terdiri dari salah satu atau gabungan metode diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain. Metode pembelajaran itu diwujudkan dalam satu atau gabungan dari bentuk pembelajaran sebagai berikut: 1) perkuliahan tatap muka kelas (luring); 2) Perkuliahan *online* (daring); 3) perkuliahan tutorial/responsi; 4) seminar; 5) praktikum; 6) penelitian, perancangan dan pengembangan

IV. KOMPOSISI DAN KELOMPOK MATA KULIAH

Berdasarkan taksonomi keilmuan, kurikulum baru Jurusan Ilmu Politik (Kurikulum 2021) memberikan bekal pengetahuan teoretis dan konseptual atas 7 (tujuh) subdisiplin utama ilmu politik (klaster), yaitu:

No	Jenis Mata Kuliah	Jumlah Mata Kuliah	Wajib	Pilihan
1	Teori dan Pemikiran Politik	13	5	8
2	Analisis Politik Indonesia	12	4	8
3	Perilaku Politik	9	4	5
4	Kebijakan Publik	9	3	6
5	Perbandingan Politik	6	2	4
6	Ekonomi Politik	6	1	5
7	Metodologi Politik	5	5	-
Total Jumlah Mata Kuliah		60	24	36

V. CAPAIAN PEMBELAJARAN KLASTER

5.1 Klaster Teori dan Pemikiran Politik

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep-konsep kekuasaan dan kebijakan, serta menerapkannya untuk memahami gejala politik yang relevan.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep formulasi hubungan negara dan masyarakat sipil dalam formulasi liberal-demokrasi dan Marxian.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan teori dan konsep keterwakilan, hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga politik serta mekanisme kerja, serta kekuatan-kekuatan yang memengaruhinya.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkannya untuk memahami kajian keterwakilan mengenai substansi keterwakilan politik.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis, fungsi, dan sistem kepartaian serta kontestasi partai dalam pemilu
6. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem dan pengelolaan pemilu dan menerapkannya dalam kajian kepemiluan.
7. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kajian ruang/*space* yang dibentuk oleh konstruksi sosial budaya serta relasi kuasa yang melingkupi
8. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori dan dinamika kekuasaan dalam konteks pascakolonialisme, antara lain: subalternitas dan hibriditas, mimikri, representasi dan resistensi, orientalisme, dan sebagainya.
9. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori politik kebudayaan dan *cultural studies*, serta menerapkannya untuk memahami gejala sosial politik terkait.
10. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori dalam konteks aksi-aksi tindakan kolektif dan gerakan ekstra parlementer.
11. Mampu menjelaskan aktor dan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan serta dinamikanya dalam perspektif antroposentrisme
12. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memetakan pemikiran dan tokoh pemikiran politik Islam masa nabi dan klasik, pertengahan dan kontemporer
13. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memetakan pemikiran dan tokoh pemikiran politik dalam tradisi liberalisme dan kapitalisme serta komunisme-marxian serta pemikiran perkembangan keduanya,
14. Mahasiswa mampu menjelaskan nilai dan konsep-konsep terkait nasionalisme serta dinamikanya dalam perkembangan globalisasi
15. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori tentang perjuangan kelompok yang relevan dengan politik perbedaaan dan politik pengakuan, serta menerapkannya untuk memahami gejala politik yang terkait aksi-aksi tindakan berbasis identitas dan budaya

5.2 Klaster Analisis Politik Indonesia

1. Mahasiswa mampu memahami pemikiran politik Indonesia dan menjelaskannya kembali secara lisan dan tertulis,
2. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori sistem politik dan menerapkan untuk menganalisis kehidupan politik Indonesia.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori kekuatan politik Indonesia dan menerapkannya untuk menganalisis politik Indonesia.

4. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori birokrasi Indonesia dan menyajikannya secara tertulis.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori pemerintahan lokal dan menerapkannya untuk menganalisis pemerintahan lokal.
6. Mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan pemerintahan desa dan menyajikannya secara tertulis dan lisan.
7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang ideologi dan gerakan politik Islam di Indonesia dan menerapkannya dalam menganalisis dalam kehidupan politik Indonesia.
8. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang komisi negara dan demokrasi Indonesia serta menerapkan dalam kehidupan politik Indonesia.
9. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menyajikan teori-teori manajemen partai politik dan tata kelola pemilu dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia.
10. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori pilkada dan konstestasi politik lokal serta menerapkan dalam sistem politik Indonesia.
11. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem pemerintahan dan komunitas adat dalam masyarakat Indonesia.

5.3 Klaster Perilaku Politik

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan struktur dan relasi sosial dalam masyarakat dan mampu menganalisis dan menjelaskannya kembali secara lisan dan tertulis.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang manusia dan perkembangan budayanya serta mampu menganalisis dan menjelaskannya kembali secara lisan dan tertulis.
3. Mahasiswa mampu mempelajari tentang teori-teori tentang konflik dan mampu menganalisis konflik dan resolusinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan *behavioralism* dan mampu menerapkan dalam analisis kajian-kajian tentang perilaku politik pada konteks politik Indonesia
5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang norma-norma politik dan mampu menganalisisnya dalam kehidupan bernegara dan menjelaskannya kembali secara lisan dan tertulis.
6. Mahasiswa mampu menjelaskan perspektif-perspektif teoretis dalam sosiologi politik dan menerapkannya untuk menganalisis dinamika sosial politik di Indonesia.
7. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang teori-teori dalam psikologi politik dan mampu menerapkan dalam konteks politik Indonesia.
8. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang teori-teori politik media dan pemasaran politik serta menggunakannya untuk menganalisis dinamika politik Indonesia.
9. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pendekatan etnografi dalam politik lokal dan mampu menjelaskannya dalam relasinya dengan politik, budaya dan relasi lokalitas dan globalisasi.

5.4 Klaster Kebijakan Publik

1. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar dari tata kelola pemerintahan dan desentralisasi serta mempraktikkannya dalam institusi pemerintahan.
2. Mahasiswa dapat memahami model, formulasi dan aktor-aktor dalam kebijakan publik serta mampu menerapkannya dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik.
3. Mahasiswa mampu memahami proses penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah serta mampu mengetahui skala prioritas dalam proses kebijakan perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan dalam memengaruhi tingkat akuntabilitas dan kualitas publik.
4. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep, model, strategi dan tahapan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta mampu mempraktikkannya dalam menyusun dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat.
5. Mahasiswa dapat memahami kebijakan kedaulatan politik dalam bidang ketahanan pangan dan pertanian serta mampu melakukan advokasi pada permasalahan agraria dan pertanian.
6. Mahasiswa mampu memahami penyelenggaraan pariwisata dan kebijakan yang menaunginya serta menjelaskan fenomena perkembangan kegiatan pariwisata, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional dengan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

5.5 Klaster Perbandingan Politik

1. Mahasiswa mampu memahami teori dan metode dalam perbandingan politik serta menyajikannya secara lisan dan tertulis.
2. Mahasiswa mampu memahami teori-teori tentang demokrasi dan demokratisasi serta mampu menerapkan perspektif perbandingan politik terutama dalam topik demokrasi dan pembangunan di Asia Tenggara.
3. Mahasiswa mampu menerapkan perspektif perbandingan politik terutama dalam topik relasi militer dan politik di negara berkembang.
4. Mahasiswa mampu menerapkan perspektif perbandingan politik terutama dalam topik relasi agama dan demokrasi.
5. Mahasiswa mampu menyajikan studi perbandingan politik secara lisan dan tertulis dalam berbagai format media.

5.6 Klaster Ekonomi Politik

1. Mahasiswa menguasai pendekatan ekonomi politik dan mampu menganalisis masalah politik domestik dan internasional dengan pendekatan ekonomi politik.
2. Mahasiswa menguasai teori-teori tentang relasi bisnis dan politik dan mampu menganalisis kasus-kasus relasi negara, korporasi dan masyarakat di tingkat lokal.

3. Mahasiswa menguasai pendekatan ekonomi politik dan mampu menganalisis kebijakan industrialisasi negara dan pengaruhnya bagi dinamika gerakan buruh di tingkat lokal
4. Mahasiswa mampu menyajikan studi ekonomi politik secara lisan tertulis dalam bentuk makalah ilmiah atau artikel opini populer

5.7 Klaster Metodologi Ilmu Politik

1. Mahasiswa mampu memahami dasar filosofis keilmuan dan menerapkan logika dalam pengamatan gejala sosial politik.
2. Mahasiswa mampu mendeskripsikan paradigma dan perspektif dalam studi dan riset politik.
3. Mahasiswa mampu mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar riset.
4. Mahasiswa mampu mendeskripsikan metode kerja positivisme dan nonpositivisme dalam desain riset kuantitatif dan kualitatif.
5. Mahasiswa mampu menyusun proposal riset, melaksanakan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif dengan program SPSS serta kualitatif, termasuk data digital.

VI. DAFTAR DAN KODE MATA KULIAH

No	Kode	Mata Kuliah	W/P	SKS	Smt
WAJIB UNIVERSITAS (6 MK/13 SKS)					
1	UNO 1001	Pendidikan Pancasila	W	2	I
2	UNO 1002	Pendidikan Agama Islam	W	2	I
	UNO 1003	Pendidikan Agama Katolik	W	2	I
	UNO 1004	Pendidikan Agama Kristen	W	2	I
	UNO 1005	Pendidikan Agama Budha	W	2	I
	UNO 1006	Pendidikan Agama Hindu	W	2	I
	UNO 1009	Pendidikan Agama Khonghucu	W	2	I
3	UNO 1010	Bahasa Indonesia	W	2	I
4	UNO 1008	Jati Diri Unsoed	W	2	I
5	UNO 1007	Pendidikan Kewarganegaraan	W	2	II
6	UNO 4009	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	W	3	VI/VIII
WAJIB FAKULTAS (3 MK/12 SKS)					
7	SPO 1101	Pengantar Sosiologi	W	3	I
8	SPO 1102	Pengantar Ilmu Politik	W	3	I
9	SPO 4003	Skripsi	W	6	VII/VIII
WAJIB JURUSAN (29 MK/80 SKS)					
10	SPP 1101	Filsafat Ilmu Pengetahuan	W	3	I
11	SPP 1102	Pengantar Ekonomi Politik	W	3	I
12	SPP 1000	English for Political Science	W	2	II
13	SPP 1203	Pengantar Statistik Sosial	W	3	II
14	SPP 1204	Pengantar Antropologi	W	3	II
15	SPP 1205	Pengantar Studi Pemerintahan	W	3	II
16	SPP 1206	Pemikiran Politik Indonesia	W	3	II

No	Kode	Mata Kuliah	W/P	SKS	Smt
WAJIB JURUSAN (29 MK/80 SKS)					
17	SPP 1207	Sistem Politik Indonesia	W	3	II
18	SPP 1208	Teknik Penulisan Ilmiah	W	1	II
19	SPP 2309	Teori Perwakilan Politik	W	3	III
20	SPP 2310	Pengantar Studi Demokrasi	W	3	III
21	SPP 2159	Teori Politik 1	W	3	III
22	SPP 2160	Pengantar Politik Digital	W	3	III
23	SPP 2313	Etika Politik	W	3	III
24	SPP 2314	Analisa Kekuatan Politik Indonesia	W	3	III
25	SPP 2115	Pengantar Kebijakan Publik	W	3	III
26	SPP 2016	Metodologi Ilmu Politik	W	3	III
27	SPP 2417	Teori dan Metode Perbandingan Politik	W	3	IV
28	SPP 2418	Teori Parpol dan Sistem Pemilu	W	3	IV
29	SPP 2419	Teori Pascakolonial dan Politik Kebudayaan Kontemporer	W	3	IV
30	SPP 2230	Metode Penelitian Sosial	W	3	IV
31	SPP 2232	Politik dan Pemerintahan Lokal	W	3	IV
32	SPP 2422	Perilaku Politik	W	3	IV
33	SPP 2261	Teori Politik 2	W	3	IV
34	SPP 2424	Analisis Kebijakan Publik	W	3	IV
35	SPP 3134	Seminar Politik 1	W	1	V
36	SPP 3035	Metode Penelitian Politik 1	W	2-1	V
37	SPP 3036	Metode Penelitian Politik 2	W	2-1	VI
38	SPP 3262	Seminar Politik 2	W	1	VI
PILIHAN JURUSAN (13 MK/39 SKS dari 37 MK/108 SKS)					
Klaster Teori dan Pemikiran Politik					
39	SPP 3011	Negara dan Masyarakat Sipil	P	3	V
40	SPP 3037	Politik Identitas dan Multikulturalisme	P	3	V
41	SPP 3039	Pemikiran Politik Islam	P	3	V
42	SPP 3040	Teori dan Politik Lingkungan	P	3	V
43	SPP 3020	Teori Gerakan Sosial	P	3	VI
44	SPP 3051	Pemikiran Politik Barat	P	3	VI
45	SPP 3055	Gender dan Politik	P	3	VI
46	SPP 3056	Ruang dan Politik Perkotaan	P	3	VI
Klaster Analisis Politik Indonesia					
47	SPP 3529	Politik dan Pemerintahan Desa	P	3	V
48	SPP 3042	Birokrasi Indonesia	P	3	V
49	SPP 3046	Pemerintahan dan Komunitas Desa Adat	P	3	V
50	SPP 3043	Manajemen Parpol dan Tata Kelola Pemilu	P	2-1	V

No	Kode	Mata Kuliah	W/P	SKS	Smt
PILIHAN JURUSAN (13 MK/39 SKS dari 37 MK/108 SKS)					
Klaster Analisis Politik Indonesia					
51	SPP 3048	Ideologi dan Gerakan Politik Islam Indonesia	P	3	V
52	SPP 3052	Pilkada dan Kontestasi Politik Lokal	P	3	VI
53	SPP 3058	Komisi Negara dan Demokrasi Indonesia	P	3	VI
54	SPP 3065	NGO dan Gerakan Politik Ekstra Parleментар	P	3	VI
Klaster Perilaku Politik					
55	SPP 3512	Konsensus dan Konflik Politik	P	3	V
56	SPP 3050	Psikologi Politik	P	3	VI
57	SPP 3054	Antropologi Politik	P	3	VI
58	SPP 3023	Teori Sosiologi Politik	P	3	VI
59	SPP 3057	Media dan Pemasaran Politik	P	2-1	VI
Klaster Kebijakan Publik					
60	SPP 3528	Pembangunan Masyarakat Desa	P	2-1	V
61	SPP 3527	Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah	P	3	V
62	SPP 3041	Politik Pelayanan Publik	P	2-1	V
63	SPP 3045	Politik Agraria dan Pertanian	P	3	V
64	SPP 3063	Politik Pariwisata	P	3	V
65	SPP 3631	Politik Anggaran	P	2-1	VI
Klaster Perbandingan Politik					
66	SPP 3525	Demokrasi dan Pembangunan Asia Tenggara	P	3	V
67	SPP 3526	Agama dan Demokrasi	P	3	V
68	SPP 3038	Nasionalisme dan Etnisitas	P	3	V
69	SPP 3047	Militer dan Politik di Negara Berkembang	P	3	V
Klaster Ekonomi Politik					
70	SPP 3044	Ekonomi Politik Globalisasi	P	3	V
71	SPP 3064	Kewirausahaan Sosial Politik	P	2	V
72	SPP 3021	Ekonomi Politik Pembangunan	P	3	VI
73	SPP 3049	Bisnis dan Politik	P	3	VI
74	SPP 3053	Politik Perburuhan	P	3	VI
75	SPP 3633	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	P	1	VI

VII. KETENTUAN TEKNIS

Dalam Panduan Akademik Kurikulum 2021 Jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed, terdapat beberapa ketentuan teknis sebagai berikut:

1. Di tahun pertama (Semester 1-2), mahasiswa mengambil mata kuliah berdasarkan sistem paket yang terdiri dari 8 (delapan) mata kuliah dengan beban studi masing-masing 20 SKS.
2. Setelah tahun pertama, mahasiswa mengambil mata kuliah dengan jumlah SKS sesuai dengan prestasi akademik yang diperoleh di semester sebelumnya sesuai ketentuan akademik fakultas.
3. Mata kuliah wajib dapat dipecah menjadi kelas paralel jika jumlah mahasiswa lebih dari 40 dan atau menyesuaikan dengan kapasitas ruangan.
4. Dosen dapat menawarkan tutorial untuk mata kuliah wajib.
5. Tutorial membagi mahasiswa dalam kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota antara 10-15 orang mahasiswa.
6. Tutorial dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) kali pertemuan dalam setiap semester.
7. Kuota minimal untuk mata kuliah pilihan adalah 5 (lima) orang mahasiswa/kelas/semester dan kuota maksimal untuk mata kuliah pilihan adalah 15 orang mahasiswa/kelas/semester.
8. Pengambilan mata kuliah pilihan dilakukan dengan prinsip *first come first served* dengan mengisi rencana studi di Sistem Informasi Akademik (SIA) dan mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik (PA).
9. Dosen/tim pengampu mata kuliah pilihan berwenang penuh untuk menawarkan atau membatalkan mata kuliah pilihan jika kuota minimal tidak tercapai dan/atau karena sebab lain.
10. Dalam kondisi tertentu yang memaksa, pihak jurusan berhak untuk tidak menawarkan mata kuliah pilihan untuk sementara waktu.
11. Dalam rangka implementasi Program MBKM, mahasiswa diperkenankan untuk mengambil mata kuliah di program studi lain di Unsoed atau mengambil salah satu atau lebih bentuk kegiatan pembelajaran yang ditawarkan, yaitu Magang, Pertukaran Pelajar, Program Kewirausahaan, Program Kampus Mengajar, Proyek di Desa, Penelitian, Proyek Kemanusiaan, dan Proyek Independen sebanyak-banyaknya 60 SKS.
12. Mata kuliah konversi dalam rangka implementasi Program MBKM ditentukan oleh Program Studi dan dimasukkan dalam pemaketan di SIA untuk diambil oleh mahasiswa.
13. Mata kuliah praktikum dibimbing oleh Tim Dosen Pengampu mata kuliah dan/atau dosen lain sesuai dengan penugasan dari fakultas atas usul pengelola program studi.
14. Mata kuliah seminar diambil oleh mahasiswa semester V dan VI untuk memaparkan rancangan proposal yang dihasilkannya untuk mata kuliah Metode Penelitian Politik 1 dan Metode Penelitian Politik 2
15. **Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengulang mata kuliah wajib hanya jika mendapatkan nilai C, D, dan E**, sedangkan bagi yang sudah mendapatkan A atau B tidak diperkenankan untuk mengulang.
16. Mahasiswa diharapkan untuk mengulang mata kuliah wajib/pilihan pada tahun keempat (semester VII atau VIII) sambil menyelesaikan proposal usulan penelitian atau penulisan skripsi.
17. Nilai yang menjadi acuan untuk dicantumkan dalam transkrip adalah nilai terakhir.

18. Mahasiswa mengajukan **outline rencana penelitian tugas akhir** ke Komisi Tugas Akhir (KTA) dengan cara mengunggahnya ke Sistem informasi Akademik (SIA) **pada semester VI** setelah menempuh **minimal 115 SKS dan IPK minimal 2,00**.
19. Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah menyelesaikan semua mata kuliah wajib dan pilihan yang dipersyaratkan tanpa nilai E.

VIII. SEBARAN MATA KULIAH PER SEMESTER

Persebaran mata kuliah di kurikulum baru didasarkan atas komposisi yang seimbang antara mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan baik di semester gasal maupun genap. Setiap semester mahasiswa mengambil mata kuliah paling banyak 8 (delapan) mata kuliah, baik wajib maupun pilihan. Beban kredit di tahun pertama maksimal adalah 20 SKS sedangkan beban kredit di tahun kedua dan seterusnya adalah maksimal 24 SKS. Jumlah Mata Kuliah Wajib adalah 38 MK (104 SKS) dan Mata Kuliah Pilihan adalah 14 MK (40 SKS) dari 36 Mata Kuliah Pilihan (109 SKS) yang ditawarkan.

GASAL			GENAP		
TAHUN I					
SEMESTER I		SKS	SEMESTER II		SKS
1. Pendidikan Pancasila	W	2	1. Pendidikan Kewarganegaraan	W	2
2. Pendidikan Agama	W	2	2. Bahasa Inggris	W	2
3. Bahasa Indonesia	W	2	3. Pengantar Statistik Sosial	W	3
4. Jati Diri Unsoed	W	2	4. Pengantar Antropologi	W	3
5. Pengantar Ilmu Politik	W	3	5. Pengantar Studi Pemerintahan	W	3
6. Pengantar Sosiologi	W	3	6. Pemikiran Politik Indonesia	W	3
7. Filsafat Ilmu Pengetahuan	W	3	7. Sistem Politik Indonesia	W	3
8. Pengantar Ekonomi Politik	W	3	8. Teknik Penulisan Ilmiah	W	1
TAHUN II					
SEMESTER III			SEMESTER IV		SKS
1. Pengantar Studi Demokrasi	W	3	1. Teori dan Metode Perbandingan Politik	W	3
2. Teori Perwakilan Politik	W	3	2. Teori Parpol dan Sistem Pemilu	W	3
3. Teori Politik I	W	3	3. Teori Pascakolonial dan Politik Kebudayaan Kontemporer	W	3
4. Pengantar Politik Digital	W	3	4. Metode Penelitian Sosial	W	3
5. Etika Politik	W	3	5. Politik & Pemerintahan Lokal	W	3
6. Analisa Kekuatan Politik Indonesia	W	3	6. Perilaku Politik	W	3
7. Pengantar Kebijakan Publik	W	3	7. Teori Politik 2	W	3
8. Metodologi Ilmu Politik	W	3	8. Analisis Kebijakan Publik	W	3
		24			24

GASAL			GENAP		
TAHUN III					
SEMESTER V			SEMESTER VI		
					SKS
1. Metode Penelitian Politik 1	W	3	1. Metode Penelitian Politik 2	W	3
2. Seminar Politik 1	W	1	2. Seminar Politik 2	W	1
3. Agama dan Demokrasi	P	3	3. Ekonomi Politik Pembangunan	P	3
4. Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah	P	3	4. Kewirausahaan Sosial Politik	P	3
5. Politik dan Pemerintahan Desa	P	3	5. Politik Anggaran	P	3
6. Pembangunan Masyarakat Desa	P	3	6. NGO dan Gerakan Politik Ekstra Parlementer	P	3
7. Demokrasi dan Pembangunan Asia Tenggara	P	3	7. Bisnis dan Politik	P	3
8. Politik Identitas dan Multikulturalisme	P	3	8. Psikologi Politik	P	3
9. Nasionalisme dan Etnisitas	P	3	9. Pemikiran Politik Barat	P	3
10. Pemikiran Politik Islam	P	3	10. Pilkada dan Kontestasi Politik Lokal	P	3
11. Teori Politik dan Lingkungan	P	3	11. Politik Perburuhan	P	3
12. Politik Pelayan Publik	P	3	12. Antropologi Politik	P	3
13. Birokrasi Indonesia	P	3	13. Gender dan Politik	P	3
14. Manajemen Parpol dan Tata Kelola Pemilu	P	3	14. Ruang dan Politik Perkotaan	P	3
15. Ekonomi Politik Internasional	P	3	15. Media dan Pemasaran Politik	P	3
16. Politik Agraria dan Pertanian	P	3	16. Komisi Negara dan Demokrasi Indonesia	P	3
17. Pemerintahan dan Komunitas Desa Adat	P	3	17. Teori Sosiologi Politik	P	3
18. Militer dan Politik di Negara Berkembang	P	3	18. Negara dan Masyarakat Sipil	P	3
19. Konsensus dan Konflik Politik	P	3	19. Teori Gerakan Sosial	P	3
20. Ideologi dan Gerakan Politik Islam Indonesia	P	3	20. Praktik Kerja Lapangan/PKL	P	1
21. Politik Pariwisata	P	3			
22. Kewirausahaan Sosial Politik	P	2			
Maksimal		24	Maksimal		23
TAHUN IV					
SEMESTER VII			SEMESTER VIII		
Mengambil/mengulang mata kuliah (MK) sebagai berikut:					
1. KKN	W	3	1. KKN	W	3
2. Skripsi/Tugas Akhir	W	6	2. Skripsi/Tugas Akhir	W	6
		9			9

IX. PRAKTIKUM

Dalam Kurikulum 2021, terdapat beberapa mata kuliah wajib dan pilihan dengan komponen praktikum yang harus diikuti oleh mahasiswa. Mata kuliah yang memiliki komponen praktikum berjumlah 7 (tujuh) mata kuliah dengan perincian 2 (dua) mata kuliah wajib dan 5 (lima) mata kuliah pilihan sebagai berikut:

9.1. Metode Penelitian Politik 1

1. Praktikum diselenggarakan dalam bentuk penugasan untuk melakukan survei atau *polling*.
2. Praktikum dilaksanakan mulai dari perencanaan, pembuatan kuesioner, penentuan lokasi dan *sample* secara acak (*random sampling*) dan pengolahan dan analisis data statistik.
3. Praktikum dipandu oleh dosen di luar pengampu mata kuliah sesuai dengan penugasan dari jurusan.
4. Beban praktikum adalah 1 SKS (setara dengan 40 jam/semester) dan menjadi bagian tidak terpisah dari mata kuliah Metode Penelitian Politik 1.
5. Biaya yang timbul dari praktikum dibebankan kepada Anggaran Fakultas.

9.2. Metode Penelitian Politik 2

1. Praktikum diselenggarakan dalam bentuk penelitian kualitatif melalui observasi partisipatif, wawancara terstruktur, dan atau pengumpulan data dokumen (*library research*).
2. Praktikum dilaksanakan mulai dari perencanaan, pembuatan panduan wawancara, *coding* dan analisis data hasil observasi, telaah dokumen dan wawancara.
3. Praktikum dipandu oleh dosen di luar pengampu mata kuliah sesuai dengan penugasan dari jurusan.
4. Beban praktikum adalah 1 SKS (setara dengan 40 jam/semester) dan menjadi bagian tidak terpisah dari mata kuliah Metode Penelitian Politik 2.
5. Biaya yang timbul dari praktikum dibebankan kepada Anggaran Fakultas.

9.3. Politik Anggaran

1. Praktikum diselenggarakan sebagai proyek kelas (*class project*) dalam bentuk magang di Sekretariat DPRD dan atau SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat.
2. Praktikum dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan magang, pengumpulan catatan lapangan tertulis/rekaman video, dokumentasi foto, dan pembuatan laporan.
3. Praktikum dipandu oleh dosen di luar pengampu mata kuliah sesuai dengan penugasan dari jurusan.
4. Beban praktikum adalah 1 SKS (setara dengan 40 jam/semester) dan menjadi bagian tidak terpisah dari mata kuliah Politik Anggaran.
5. Biaya yang timbul dari praktikum dibebankan kepada Anggaran Fakultas.

9.4. Manajemen Partai Politik dan Tata Kelola Pemilu

1. Praktikum diselenggarakan sebagai tugas individu dalam bentuk magang di Sekretariat KPU/Pengawas Pemilu.

2. Praktikum dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan magang, pengumpulan catatan lapangan tertulis/rekaman video, dokumentasi foto, dan pembuatan laporan.
3. Praktikum dipandu oleh dosen di luar pengampu mata kuliah sesuai dengan penugasan dari jurusan.
4. Beban praktikum adalah 1 SKS (setara dengan 40 jam/semester) dan menjadi bagian tidak terpisah dari mata kuliah Manajemen Partai Politik dan Tata Kelola Pemilu.
5. Biaya yang timbul dari praktikum dibebankan kepada Anggaran Fakultas.

9.5. Politik dan Pemerintahan Desa

1. Praktikum diselenggarakan sebagai proyek kelas (*class project*) dalam bentuk tinggal bersama (*live-in*) dan atau kemah bakti dengan masyarakat desa.
2. Praktikum dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kunjungan lapangan, pengumpulan catatan lapangan tertulis/rekaman video, dokumentasi foto, dan pembuatan laporan.
3. Praktikum dipandu oleh dosen di luar pengampu mata kuliah sesuai dengan penugasan dari jurusan.
4. Beban praktikum adalah 1 SKS (setara dengan 40 jam/semester) dan menjadi bagian tidak terpisah dari mata kuliah Politik dan Pemerintahan Desa.
5. Biaya yang timbul dari praktikum dibebankan kepada Anggaran Fakultas.

9.6. Politik Pelayanan Publik

1. Praktikum diselenggarakan sebagai tugas individu dalam bentuk magang di Sekretariat KPU/Pengawas Pemilu.
2. Praktikum dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan magang, pengumpulan catatan lapangan tertulis/rekaman video, dokumentasi foto, dan pembuatan laporan.
3. Praktikum dipandu oleh dosen di luar pengampu mata kuliah sesuai dengan penugasan dari jurusan.
4. Beban praktikum adalah 1 SKS (setara dengan 40 jam/semester) dan menjadi bagian tidak terpisah dari mata kuliah Manajemen Partai Politik dan Tata Kelola Pemilu.
5. Biaya yang timbul dari praktikum dibebankan kepada Anggaran Fakultas.

9.7. Media dan Pemasaran Politik

1. Praktikum diselenggarakan sebagai tugas individu dalam bentuk magang di kantor redaksi koran/majalah/televisi/radio/media *online*.
2. Praktikum dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan magang, pengumpulan catatan lapangan tertulis/rekaman video, dokumentasi foto, dan pembuatan laporan.
3. Praktikum dipandu oleh dosen di luar pengampu mata kuliah sesuai dengan penugasan dari jurusan.
4. Beban praktikum adalah 1 SKS (setara dengan 40 jam/semester) dan menjadi bagian tidak terpisah dari mata kuliah Media dan Pemasaran Politik.
5. Biaya yang timbul dari praktikum dibebankan kepada Anggaran Fakultas.

X. MATA KULIAH KONVERSI

Transisi dari Kurikulum 2016 ke Kurikulum 2021 membawa perubahan karena penghapusan, penambahan, pemadatan, penggabungan dan perubahan nama mata kuliah. Konversi mata kuliah dilakukan oleh pengelola program studi dengan mempertimbangkan kesesuaian deskripsi mata kuliah dan keahlian dosen pengampu.

XI. DAFTAR DOSEN PENGAMPU DAN MATA KULIAH POKOK

Dosen Jurusan Ilmu Politik terdiri dari 17 orang dosen tetap dengan latar belakang pendidikan S2 dan S3 dari universitas dalam maupun luar negeri. Daftar lengkap dosen adalah sebagai berikut:

NO	NAMA DAN NIP	TEMPAT LAHIR/ ASAL	PENDIDIKAN TERAKHIR	MATA KULIAH POKOK
1	Drs. M. Soebiantoro, M.Si. 19620909 198803 1 001	Purwokerto	S2 Ilmu Politik UGM	Pengantar Ilmu Politik
2	Drs. Solahuddin Kusumanegara, M.Si. 19630612 198901 1 001	Malang	S2 Ilmu Politik UGM	Sistem Politik Indonesia
3	Drs. Syah Firdaus, M.Si. 19580414 199002 1 001	Jakarta	S2 Ilmu Politik UGM	Pengantar Ilmu Politik
4	Drs. Bambang Suswanto, M.Si. 19571109 198901 1 001	Purbalingga	S2 Ketahanan Nasional UGM	Pemikiran Politik Indonesia
5	Dr. Bambang Kuncoro, M.Si. 19561004 198601 1 001	Sukoharjo	S3 Ilmu Sosial UNAIR	Birokrasi Indonesia
6	Luthfi Makhasin, M.A., Ph.D. 19770529 200112 1 001	Banyumas	S3 Asian Studies, ANU Australia	Demokrasi dan Pembangunan Asia Tenggara
7	Ahmad Rofik, S.Sos, M.A. 19710513 200112 1 002	Batang	S2 Ilmu Politik UGM	Sosiologi Politik
8	Dr. Sos. Waluyo Handoko, M.Sc. 19711018 199303 1 003	Banjarnegara	S2 Rural Development CLSU, The Phillipine S3 Ilmu Politik Undip	Politik dan Pemerintahan Lokal
9	Dr. Indaru Setyo Nurprojo, S.IP., M.A. 19770806 200312 1 001	Purbalingga	S2 Ilmu Politik UGM S3 Ilmu Politik UGM	Politik dan Pemerintahan Desa
10	Dr. Sofa Marwah, M.Si. 19750426 200312 2 001	Kediri	S3 Ilmu Politik UI	Pengantar Studi Demokrasi
11	Triana Ahdiati, M.Si. 19700719 200501 2 001	Bandung	S2 Kajian Wilayah Amerika UI	Teori Pascakolonial dan Politik Kebudayaan Kontemporer
12	Khairu Roojiqien Sobandi, S.IP., M.Si., M.A. 19820219 200501 1 001	Kuningan	S2 Ilmu Politik UNDIP S2 University of Wyoming, USA S3 (kandidat) Canterbury University, New Zealand	Kebijakan Publik

NO	NAMA DAN NIP	TEMPAT LAHIR/ ASAL	PENDIDIKAN TERAKHIR	MATA KULIAH POKOK
13	Oktafiani Catur Pratiwi, M.A. 19791027 200501 2001	Tegal	S2 Ilmu Politik UGM	Pengantar Studi Pemerintahan
14	Ahmad Sabiq, M.A. 19760212 200604 1 001	Magelang	S2 ISS The Hague, Belanda	Teori Parpol dan Sistem Pemilu
15	Bowo Sugiarto, S.IP., M.Si. 19800304 200912 1 001	Cirebon	S2 Ilmu Politik UGM S3 (kandidat) Tilburg University, Belanda	Pengantar Studi Demokrasi
16	Andi Ali Said Akbar, S.IP., M.A. 19790920 200912 1 001	Wajo (Sulawesi Selatan)	S2 Ilmu Politik UGM	Teori Parpol dan Sistem Pemilu
17	Titis Perdani, S.Sos, M.Sos	Banyumas	S1 Ilmu Pemerintahan UNDIP S2 Ilmu Politik UNDIP	Perilaku Politik

XII. DESKRIPSI MATA KULIAH

Deskripsi mata kuliah ini dibuat untuk memberi gambaran singkat tentang mata kuliah yang disediakan untuk Program Studi S1 Ilmu Politik FISIP Unsoed. Daftar mata kuliah dan deskripsinya disusun berdasarkan jenis mata kuliahnya sebagai berikut:

11.1 MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN/SIKAP

1. Pendidikan Pancasila/ UNO 1001

Mata kuliah ini mempelajari tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi nasional, serta Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM). Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu berpikir dan bersikap sesuai hati nuraninya, serta mampu memaknai sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

2. Pendidikan Agama (Pilih Salah satu)

1) Pendidikan Agama Islam/ UNO 1002

Pemahaman dan penghayatan tentang aspek yang berhubungan dengan keadaan mahluk, pelaksanaan ajaran Islam, peningkatan keimanan kepada sang Pencipta, kerasulan dan melaksanakan syariat Islam.

2) Pendidikan Agama Katolik/ UNO 1003

Pengetahuan tentang manusia yang beriman kepada Allah melalui Kristus di dalam gereja, hidup bergereja dan bermasyarakat dalam rangka pengembangan sikap dan mentalitas hidup pribadi seseorang yang percaya kepada Allah. Mampu menyatakan iman dalam kehidupan sehari-hari, dalam berhubungan dengan Allah, sesama manusia, alam semesta dan negara dan bangsa.

3) Pendidikan Agama Kristen Protestan/ UNO 1004

Kuliah ini mendalami pengertian tentang agama, ibadah, pernyataan Allah, manusia citra Allah, perkawinan, dosa dan reaksi Allah, pribadi dan karya Yesus, Roh Kudus,

perjanjian lama dan baru, gereja, injil, dan eskatologi iman dan persaksian.

4) Pendidikan Agama Budha/ UNO 1005

Pemahaman tentang agama Budha dan pengalamannya dalam masyarakat beragama, darma, dan kebaktian untuk iman (*sadha*) dalam menjaga kelangsungan hidup agama, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

5) Pendidikan Agama Hindu/ UNO 1006

Penghayatan keagamaan yang mantap kepada Sang Hyang Widhi Wasa sehingga mampu mengendalikan diri dalam berpikir, berbicara, berbuat dalam pengabdian kepada nusa, bangsa dan negara

6) Pendidikan Agama Konghucu/ UNO 1009

Tujuan pendidikan Agama Konghucu ini adalah agar mahasiswa mendapatkan informasi yang benar tentang Agama Konghucu, mengerti, memahami, dan mengambil intisari ajaran Agama Konghucu yang bersifat universal sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengamalkan di dalam kehidupan supaya menjadi seorang Kuncu (Berbudi Luhur), mempunyai budi pekerti luhur dan akhlak yang tinggi, mempunyai etika yang tinggi berdasarkan Cinta Kasih, Kebenaran, Susila, Bijaksana, dan dapat dipercaya yang pada akhirnya dapat menjadi masyarakat yang baik dan dapat membangun Bangsa dan Negara Indonesia.

3. Pendidikan Kewarganegaraan/ UNO 1007

Mata kuliah ini membahas dan memberi pemahaman tentang masalah Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas) secara komprehensif dan integral. Pokok bahasannya meliputi wawasan nusantara, pendidikan bela negara, hak asasi manusia (HAM), ketahanan nasional, politik dan strategi Hankamnas serta sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.

4. Jati Diri Unsoed/ UNO 1008

Mata kuliah ini menjelaskan tentang hakekat manusia, kepribadian dan pengendalian diri, serta pemaknaan atas visi dan misi Unsoed. Selain itu, mata kuliah ini juga berisi materi tentang nilai kejuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman, pedoman pengelolaan diri, wawasan kebangsaan, etika dan kesadaran hukum.

5. Bahasa Indonesia/ UNO 1010

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat terampil menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan karya ilmiah dan dalam komunikasi lisan. Selain itu, mata kuliah ini juga dirancang agar mahasiswa menghargai perbedaan budaya yang ada dan arti penting Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

11.2 MATA KULIAH KETERAMPILAN

6. KKN/ UNO 4009

Kuliah kerja nyata membekali mahasiswa keterampilan praktis untuk menerapkan pengetahuan teoretis yang dimilikinya selama kuliah melalui interaksi langsung dengan masyarakat dalam bentuk praktik kerja lapangan (*fieldwork*) dan pengabdian kepada masyarakat (*community services*). Mahasiswa diharapkan untuk tinggal dan bekerja bersama masyarakat di sebuah desa/komunitas selama satu sampai dengan dua bulan. Dalam hal ini,

mahasiswa merumuskan dan melaksanakan program pengabdian yang disusun berdasarkan kebutuhan riil komunitas di mana mahasiswa tersebut tinggal.

7. Skripsi/ SPO 4003

Skripsi adalah laporan tugas akhir tertulis yang disusun setelah mahasiswa menyelesaikan minimal 120 SKS perkuliahan. Dalam hal ini, mahasiswa menentukan sendiri pilihan topik skripsi sesuai minat penelitiannya di bawah arahan dosen pembimbing. Setelah menyelesaikan skripsi, mahasiswa wajib mengikuti ujian akhir dan pendarasan untuk menentukan kelaikan skripsinya di bawah dosen penguji.

8. English for Political Science/ SPP 1000

Bahasa Inggris (English) adalah salah satu keterampilan yang menjadi salah satu syarat kompetensi kelulusan, baik lulus dalam perkuliahan maupun lulus dalam tes penerimaan di dunia kerja kelak. Oleh karena itu, mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa agar bisa memahami bahasa Inggris dengan baik dan benar secara efektif dan efisien. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan praktis untuk membaca dan mengakses materi berbahasa Inggris yang sesuai dengan bidang ilmu politik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa juga diharapkan memiliki keterampilan untuk menggunakan bahasa Inggris secara pasif untuk komunikasi tulis ataupun lisan seperti: menulis ringkasan hasil riset/penelitian dengan menggunakan tata bahasa baku (*grammar*).

9. Filsafat Ilmu Pengetahuan/ SPP 1101

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan bekal keterampilan umum kepada mahasiswa tentang dasar-dasar berpikir logis, kritis, sistematis dan rasional. Materi perkuliahan meliputi pengertian filsafat ilmu, perkembangan filsafat ilmu, silogisme dan dasar-dasar logika, serta dasar penyimpulan deduktif dan induktif. Selain itu, mata kuliah ini berisikan dasar-dasar filsafat yang berguna dalam pemahaman ilmu pengetahuan dan perkembangannya. Oleh karena itu, tema-tema yang diberikan dalam kuliah ini berkisar tentang pokok-pokok filsafat yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan keberadaan ilmu pengetahuan, dari awal kemunculannya sampai dengan perkembangannya hingga dewasa ini. Pembagian tema dalam setiap pertemuan kuliah didasari oleh pertimbangan untuk membahas unsur-unsur dalam proses pemahaman signifikansi keberadaan ilmu pengetahuan dan perkembangannya, seperti: dasar-dasar filsafat, taksonomi keilmuan, konsep dan teori tentang perkembangan ilmu pengetahuan, serta pemikiran-pemikiran yang memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.

10. Pengantar Statistik Sosial/ SPP 1203

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan bekal keterampilan kepada mahasiswa agar dapat mengoperasikan perangkat lunak pengolahan data statistik. Materi yang diberikan mencakup cara kerja statistik dalam suatu penelitian sosial dalam bentuk statistika deskriptif. Materi perkuliahan meliputi pengertian, peranan, dan cara kerja statistik, penyajian data baik dalam diagram, baris grafik maupun batang histogram, *polygon*, ukuran gejala pusat, ukuran dispersi, dan kemiringan serta keruncingan suatu kurva.

11. Teknik Penulisan Ilmiah/ SPP 1208

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan bekal keterampilan praktis kepada mahasiswa tentang teknik penulisan referensi karya ilmiah sesuai standar baku yang dipakai

secara internasional. Selain itu, materi bahasan juga mencakup panduan teknis untuk penulisan makalah, *paper*, esai, dan tinjauan kritis (*critical review*). Dengan mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan akademis untuk membuat karya ilmiah untuk mendukung tugas-tugas selama perkuliahan

12. Seminar Politik 1/ SPP 3134

Mata kuliah ini memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk merancang penelitian tugas akhir/skripsi. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini menggunakan bentuk pembelajaran seminar yang memberikan panduan kepada mahasiswa tentang peta riset dan kajian terbaru di bidang politik dan/atau riset yang dilakukan dosen. Mata kuliah Seminar Politik 1 dirancang untuk mendukung mata kuliah Metode Penelitian Politik 1. Oleh karena itu, peta riset yang dan kajian yang diberikan dalam perkuliahan ini adalah topik-topik yang bisa dikaji dan/atau diteliti dengan metode penelitian kuantitatif. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk mempresentasikan draf proposal yang dihasilkan dari proses kuliah Metode Penelitian Politik 1.

13. Seminar Politik 2/ SPP 3262

Mata kuliah ini memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk merancang penelitian tugas akhir/skripsi. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini menggunakan bentuk pembelajaran seminar yang memberikan panduan kepada mahasiswa tentang peta riset dan kajian terbaru di bidang politik dan/atau riset yang dilakukan dosen. Mata kuliah Seminar Politik 2 dirancang untuk mendukung mata kuliah Metode Penelitian Politik 2. Oleh karena itu, peta riset yang dan kajian yang diberikan dalam perkuliahan ini adalah topik-topik yang bisa dikaji dan/atau diteliti dengan metode penelitian kualitatif. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk mempresentasikan draf proposal yang dihasilkan dari proses kuliah Metode Penelitian Politik 2.

14. Praktik Kerja Lapangan/ SPP 3633

Mata kuliah ini menggunakan bentuk pembelajaran yang berupa praktikum lapangan dengan cara bekerja magang di instansi pemerintah/swasta sesuai dengan pilihan mahasiswa. Di akhir magang, mahasiswa diwajibkan untuk membuat laporan tugas akhir tertulis dan/atau presentasi lisan.

11.3 MATA KULIAH KEAHLIAN

11.3.1 Kelompok Mata Kuliah Teori dan Pemikiran Politik

15. Pengantar Ilmu Politik/ SPO 1102

Mata kuliah ini dirancang memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang dasar-dasar pengetahuan mengenai politik. Materi perkuliahan meliputi dasar-dasar politik, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan, ruang lingkup ilmu politik, hubungan ilmu politik dan ilmu lainnya, konsep ilmu politik, asal mula terbentuknya negara, dan partai politik.

16. Teori Politik 1/ SPP 2159

Teori politik 1 meliputi kajian konsep-konsep pokok dalam Ilmu Politik, yaitu teori-teori tentang negara dan kekuasaan. Kajian ini mengelaborasi ide pokok dari keinginan manusia menciptakan satu organisasi politik yang mampu mengendalikan kepentingan dan kekuasaan yang saling bersaing dan cenderung antagonis di antara masyarakat. Di sinilah banyak teori tentang lahirnya Negara-Bangsa. Latar belakang politik munculnya ide

membentuk bangsa dan negara. Manusia berusaha mencari penjelasan basis-basis keabsahan kekuasaan yang dimiliki negara dan membuatnya lebih otoritatif dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Selain itu, manusia juga berusaha mencari penjelasan pembentukan identitas nasional, identitas kewargaan suatu bangsa yang melampaui identitas spesifik atau sempit lainnya. Selanjutnya, mata kuliah ini menjelaskan konsep-konsep kekuasaan, sumber-sumber kekuasaan, legitimasi kekuasaan, cara kerja kekuasaan, perubahan dan krisis kekuasaan. Kajian ini juga menjelaskan bagaimana upaya masyarakat mengendalikan kekuasaan dengan cara moral, institusional dan budaya.

17. Teori Politik 2/ SPP 2261

Mata kuliah ini meliputi kajian hubungan warga negara dengan pemerintah. Dalam mata kuliah ini, dijelaskan cara dan saluran yang digunakan warga negara untuk memengaruhi jalannya pemerintahan. Kajian dimulai dari proses pembentukan kesadaran politik masyarakat, pembentukan organisasi-organisasi politik masyarakat, bentuk-bentuk saluran terlembaga, baik dalam konteks elektoral maupun nonelektoral, pola-pola relasi yang terbentuk dan bersifat restriktif, kolaboratif dan/atau konfliktual. Selain itu, kajian ini juga mengangkat bagaimana teoretisasi kontemporer tentang cara kerja kekuasaan di masyarakat yang memfokuskan diri pada multiperspektif, yaitu: modernisasi, liberalisasi, elit, budaya dan ekonomi politik. Dengan demikian, akan semakin variatif dan luas jangkauan kemampuan menteoritisasi cara kerja kekuasaan di masyarakat.

18. Teori Perwakilan Politik/ SPP 2309

Mata kuliah ini memberikan perspektif teoretis tentang trias politika terutama cabang kekuasaan legislatif dan perannya dalam sistem politik demokrasi. Selain itu, mata kuliah ini juga dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual kepada mahasiswa tentang mekanisme kerja dan kekuatan-kekuatan sosial yang berperan dalam memengaruhi struktur kelembagaan, cara kerja politik dari lembaga legislatif dan dinamika perwakilan politik secara umum. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami produk legislasi sebagai hasil dari dinamika hubungan kekuasaan, baik di tingkat nasional maupun lokal.

19. Teori Partai Politik dan Sistem Pemilu/ SPP 2418

Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk dapat memahami, menjelaskan dan menganalisa berbagai hal terkait partai politik dan pemilihan umum. Pembahasan dimulai dari pengertian partai, asal mula dan jenis-jenis sistem kepartaian hingga mempelajari kehidupan sistem kepartaian di Indonesia, pemilihan umum, pengertian sistem pemilu serta kajian mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia.

20. Teori Pascakolonial dan Politik Kebudayaan Kontemporer/ SPP 2419

Mata kuliah ini berisikan dasar-dasar teori pascakolonial dan politik kebudayaan kontemporer yang sangat berguna untuk memahami perkembangan ilmu politik yang terkait dengan resonansi kajian pascakolonialisme yang berimplikasi pada seluruh ambiguitas dan kompleksitas dari berbagai pengalaman kebudayaan yang berbeda sebagai akibat dari adanya praktik-praktik kolonialisme. Secara umum, pokok bahasan dalam mata kuliah ini dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian pembahasan, yaitu: 1) Pembahasan Teori Pascakolonial yang meliputi tema-tema tentang kekuasaan dan pengetahuan, representasi dan resistensi, *subalternity* dan *hybridity*, orientalisme, dan nasionalisme; 2) Pembahasan Politik

Kebudayaan Kontemporer yang meliputi tema-tema tentang politik kebudayaan dalam kajian pascakolonial, *cultural studies*, kebudayaan populer, ideologi, hegemoni kebudayaan, apparatus ideologis negara (*Ideological State Apparatus*) kekerasan budaya (*cultural violence*), kekerasan simbolik (*symbolic violence*), globalisasi budaya, *cyber* dan *digital culture*.

21. Negara dan Masyarakat Sipil/ SPP 3011

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang konsep umum negara dan masyarakat sipil, serta arti penting dari kedua konsep tersebut dalam teori politik klasik dan modern. Mata kuliah ini menjabarkan teori negara dalam berbagai tradisi pemikiran, seperti negara sebagai instrumen kepentingan kelas dalam Marxisme dan negara sebagai institusi legal-rasional dalam tradisi pemikiran liberal. Keseluruhan kajian teoretis tersebut akan membantu mahasiswa memahami basis dan dinamika perjuangan organisasi masyarakat sipil yang berbasis agama, budaya, profesi dan intelektual di tingkat lokal dan nasional.

22. Teori Gerakan Sosial/ SPP 3020

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai perspektif teoretis yang digunakan untuk menganalisa aksi politik kolektif dan gerakan ekstra parlemen. Beberapa konsep yang diperkenalkan meliputi politik sengketa (*contentious politics*), *framing* dan proses politik (*political process*), jaringan (*networking*), dan mobilisasi sumber daya (*resources mobilization*). Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan contoh konkret tentang berbagai bentuk aksi kolektif/gerakan sosial ekstra parlemen seperti gerakan mahasiswa, gerakan lingkungan, gerakan perempuan, dan berbagai aksi protes antikemampuan di luar struktur politik formal.

23. Politik Identitas dan Multikulturalisme/ SPP 3037

Mata kuliah ini mencakup dua konsep besar, yaitu politik identitas dan multikulturalisme. Politik identitas merupakan gerakan/aksi kolektif yang disatukan oleh identitas bersama dari individu/kelompok yang tertindas/terpinggirkan baik dari segi ras, etnisitas, agama, gender, orientasi seksual, maupun jaringan yang terbentuk oleh kesamaan minat dan semangat. Kajian politik identitas memfokuskan pada bagaimana kelompok memperjuangkan identitasnya melalui politik perbedaan dan politik pengakuan. Sementara itu, multikulturalisme adalah paham yang berakar dari pluralitas budaya dan mengedepankan kesetaraan dalam perbedaan (*equality in diversity*). Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami model gerakan/aksi politik kontemporer yang tidak menysar pada distribusi sumber daya tapi lebih menitikberatkan pada hak budaya dan identitas kolektif yang bersifat *immaterial*.

24. Pemikiran Politik Islam/ SPP 3039

Mata kuliah ini mempelajari perkembangan konsep pemikiran politik Islam mulai dari masa nabi dan pemikir Islam klasik seperti Al Farabi, Al Mawardi, Al Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun sampai dengan pemikir Islam modern/kontemporer seperti Abu Ala Maududi, an Nabhani, Bediuzzaman Said Nursi, Hasan al Banna, Muhammad Iqbal, Imam Khomeini, Hasan Hanafi, Fazlur Rahman, Asef Bayat, Khaled Abu el Fadl, dan Tariq Ramadan.

25. Pemikiran Politik Barat/ SPP 3051

Mata kuliah ini membahas tentang pemikiran politik Barat yang merangkum spektrum pemikiran politik Barat berdasarkan kronologi waktu, tokoh-tokoh, tradisi pemikiran, dan/atau ideologi politik yang melahirkan pemikiran tersebut. Materi yang diberikan melingkupi pendalaman atas salah satu atau beberapa topik tentang pondasi kehidupan yang baik seperti kedaulatan, kebebasan, kesetaraan, keadilan dan evolusinya baik di masa klasik, modern dan kontemporer. Materi bahasan lain mencakup gagasan dan ideologi politik besar (nasionalisme, Marxisme/komunisme, sosialisme, kapitalisme, dan liberalisme/neoliberalisme) yang pernah dan masih memainkan peran penting dalam perkembangan teori politik klasik maupun kontemporer.

26. Teori Politik dan Lingkungan/ SPP 3040

Mata kuliah ini memberikan kepada mahasiswa teori dan etika lingkungan dalam perspektif antroposentrisme dan ekosentrisme, kebijakan tentang lingkungan, lingkungan dalam perspektif ekonomi politik, keterlibatan aktor-aktor lokal maupun internasional dalam isu-isu lingkungan serta menganalisa berbagai isu lingkungan dalam pembangunan yang terjadi Indonesia dan negara lain.

27. Gender dan Politik/ SPP 3055

Mata kuliah ini menjelaskan keterkaitan antara gender dan politik. Secara terperinci, mata kuliah ini menjelaskan tentang konstruksi sosial yang terbentuk akibat adanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan meninjau aspek-aspek terkait dalam dunia politik, baik secara teoretis maupun praktis. Materi perkuliahan mencakup pembahasan tentang evolusi konseptual tentang gender, posisi kajian gender dalam analisis politik dan ketimpangan politik yang berbasis gender. Selain itu, mata kuliah ini juga menjelaskan metodologi penelitian berperspektif gender dan perkembangan paradigma dalam kajian gender, serta kritik terhadap konsep gender dan perkembangannya.

28. Ruang dan Politik Perkotaan/ SPP 3056

Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa tentang kaitan antara ruang (*space*) sebagai konstruksi sosial dan pengaruhnya bagi dinamika dan relasi kekuasaan. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini mencakup beberapa teori utama tentang ruang dan politik perkotaan yang berkembang dalam disiplin ilmu sosiologi seperti Max Weber, Henri Lefebvre, Walter Benjamin, David Harvey, Edward Soja, dan Manuel Castells.

11.3.2 Kelompok Mata Kuliah Analisis Politik Indonesia**29. Pemikiran Politik Indonesia/ SPP 1206**

Mata kuliah ini mempelajari berbagai pemikiran politik dari berbagai spektrum ideologi/ aliran yang berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, mata kuliah ini membawa mahasiswa pada pembahasan tentang gagasan para tokoh pendiri bangsa dari yang beraliran nasionalisme sekuler, pan-Islamisme, tradisionalisme Jawa, sosialisme, komunisme, dan sintesis pemikiran tersebut dalam formulasi ideologi Pancasila.

30. Sistem Politik Indonesia/ SPP 1207

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai sistem politik yang pernah dan berlaku di Indonesia. Dalam kuliah ini, mahasiswa terlebih dahulu diperkenalkan dengan pendekatan analisis sistem politik. Fungsi-fungsi,

struktur-struktur dalam sistem politik, kelompok kepentingan, partai politik, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mendapat sorotan pembahasan utama dalam materi perkuliahan ini. Selain mengupas fungsi-fungsi *input* dan *ouput* serta struktur yang menjalankannya, tidak ketinggalan juga dibahas mengenai partisipasi masyarakat dalam sistem politik. Berdasarkan bahan konseptual tersebut, mahasiswa diajak membahas sistem politik demokrasi Pancasila setelah keberhasilan gerakan reformasi yang meruntuhkan sistem politik otoriter Orde Baru.

31. Analisa Kekuatan Politik Indonesia/ SPP 2314

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang kekuatan-kekuatan politik berpengaruh/dominan di Indonesia. Dalam hal ini, mahasiswa diajak untuk menganalisa konteks historis munculnya kekuatan-kekuatan politik dominan, serta posisi, interaksi dan peran yang dimainkan oleh masing-masing dalam memengaruhi arah perkembangan/perubahan dan/atau mempertahankan tatanan politik di Indonesia, baik di level nasional maupun lokal.

32. Politik dan Pemerintahan Lokal/ SPP 2232

Mata kuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa tentang konsep-konsep, dasar-dasar teori, model, perspektif, dan pendekatan sehingga mahasiswa tersebut mampu memahami dan menganalisa ihwal dinamika politik dan pemerintahan lokal di Indonesia, serta memetik pelajaran dari berbagai pengalaman. Melalui berbagai pendekatan seperti kelembagaan, kekuasaan, sejarah, dan perspektif fungsional, fokus kajian diletakkan pada dinamika politik desentralisasi, demokratisasi lokal, dan pembangunan di tingkat lokal. Dengan pendekatan kelembagaan, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan *medebewind* berikut praktik penerapannya di Indonesia. Dengan pendekatan kekuasaan, dipertanyakan: siapakah yang sesungguhnya (*de facto*) membuat keputusan politik di daerah.

33. Birokrasi Indonesia/ SPP 3042

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang birokrasi Indonesia. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa diberikan teori-teori dasar birokrasi, relasi birokrasi dan politik, evolusi budaya birokrasi Indonesia dari yang bercorak pangreh praja menjadi pamong praja. Selain itu, materi bahasan juga mencakup institusi birokrasi di Indonesia dan perannya dalam merespon perubahan dalam konteks sistem politik demokrasi—baik di ranah lokal maupun nasional—dan kemampuannya dalam merespon persaingan dari luar akibat globalisasi dan pasar bebas.

34. Manajemen Parpol dan Tata Kelola Pemilu/ SPP 3043

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan teoretis dan praktis kepada mahasiswa tentang pengelolaan partai politik dan pemilu di Indonesia. Pembahasannya meliputi manajemen internal partai politik, pengorganisasian, pendanaan partai politik dan penyelesaian sengketa parpol. Sedangkan pokok bahasan lain adalah tentang tata kelola pemilu setelah era reformasi di Indonesia, khususnya tentang kelembagaan dan mekanisme kerja lembaga penyelenggara pemilu dan berbagai lembaga pendukung kepemiluan lainnya seperti Bawaslu/Panwaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

35. Pemerintahan dan Komunitas Desa Adat/ SPP 3046

Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti *huta/nagori* di Sumatera Utara, *gampong* di Aceh, *nagari* di Minangkabau, *marga* di Sumatera bagian selatan, *tiuh* atau *pekon* di Lampung, *desa pakraman/desa adat* di Bali, *lembang* di Toraja, *banua* dan *wanua* di Kalimantan, dan *negeri* di Maluku. Mata kuliah ini akan membahas desa adat dan posisinya secara politik di Indonesia pascaberlakunya regulasi baru tentang desa.

36. Ideologi dan Gerakan Politik Islam di Indonesia/ SPP 3048

Islam bukan hanya agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, tapi juga kekuatan politik yang memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan sampai sekarang. Sejak masa Sarekat Islam (SI), Islam turut memainkan peran dalam pergerakan nasional yang membentuk kesadaran nasional sebagai satu bangsa. Setelah proklamasi kemerdekaan, perdebatan politik diwarnai oleh perbedaan pandangan tentang bagaimana memosisikan agama dalam konstitusi antara mereka yang setuju dengan Piagam Jakarta dan mereka yang menentangnya. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang peran politik Islam di Indonesia.

37. Pilkada dan Kontestasi Politik Lokal/ SPP 3052

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan perspektif teoretis dan kerangka konseptual untuk menjelaskan Pilkada dan pertarungan politik pada tingkat lokal di Indonesia pascareformasi. Dengan demikian, mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan analisis kritis tentang liberalisasi politik di daerah dalam mendorong dan/atau memperlemah bangunan demokrasi yang dibangun dengan mempertimbangkan keunikan dan kekhasan politiknya masing-masing.

38. Komisi Negara dan Demokrasi Indonesia/ SPP 3058

Gagasan tentang pemisahan kekuasaan telah diterima luas sebagai hal yang mutlak dan perlu dalam sistem demokrasi. Montesquieu memisahkan antara pembuat, pelaksana dan pengawas dalam tiga institusi politik utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal ini, ketiganya berfungsi dalam prinsip keseimbangan untuk menghindari pemusatan kekuasaan (*check and balance*). Perkembangan demokrasi kemudian menuntut lahirnya lembaga-lembaga negara di luar kerangka *trias politica* untuk menjalankan peran dan fungsi-fungsi baru dan spesifik dalam sistem demokrasi. Mata kuliah ini memberikan kerangka konseptual dan analisis aktual atas lembaga-lembaga sampiran negara (*state auxiliary agencies*) yang lahir setelah era reformasi seperti KPK, KPU, Komisi Yudisial dan lain-lain.

39. NGO dan Gerakan Politik Ekstra Parleментар/ SPP 3065

Mata kuliah ini menjelaskan eksistensi *non-governmental organization (NGO)*/ lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai gejala politik masyarakat modern dan akomodasi berkembangnya kelompok intelektual yang kemudian sering disebut kelas menengah independen atau kelas menengah terdidik. Kelompok intelektual ini memiliki kemampuan membangun organisasi politik yang relatif mandiri dari negara dan kekuatan politik yang tumbuh ditengah masyarakat. Mata kuliah ini mendorong mahasiswa memiliki kemampuan

mengelola *NGO* sebagai organisasi sosial politik yang menjembatani relasi negara dan rakyat demi terciptanya demokratisasi, partisipasi, keadilan dan pengawasan publik. Materi kuliah meliputi: kepemimpinan dan manajemen organisasi, nilai-nilai pergerakan, strategi membangun kepercayaan dan jaringan, pendidikan orang dewasa, teknik pemberdayaan dan advokasi, teknik penyusunan perencanaan program. Gerakan ekstraparlementer adalah ekspresi tertinggi dari kekuatan rakyat yang terletak pada kekuatan isu dan massa. Gerakan ini sangat efektif mengimbangi jalanya kekuasaan pemerintah yang bertumpu pada kekuatan kewenangan dan aparatur. Karenanya pengetahuan pengorganisasian gerakan ekstraparlementer bagi mahasiswa menjadi penting dengan menguasai beberapa aspek berikut: 1) penguatan organisasi gerakan intra dan ekstra kampus; 2) penguatan intelektualitas dan kepemimpinan; 3) penajaman dan penguasaan isu dan data; 4) pengelolaan jejaring gerakan di dalam kampus dan organisasi masyarakat; 5) penguasaan manajemen aksi, propaganda, negosiasi dan konsensus.

40. Politik dan Pemerintahan Desa/ SPP 3529

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang demokrasi dan dinamika politik desa di Indonesia. Kajian Politik dan Pemerintahan Desa dimulai sejak masa Orde Lama hingga sekarang dan berbagai perundang-undangan yang mengaturnya. Mahasiswa diajak menganalisa tentang perubahan status desa dari *self-governance community* menjadi rantai birokrasi negara yang terendah; relasi politik desa dengan supra desa (otonomi) dan dinamika politik di internal desa (demokrasi), serta kajian tentang desa adat, desa kepulauan dan isu-isu politik desa kekinian.

11.3.3 Kelompok Mata Kuliah Perilaku Politik

41. Pengantar Sosiologi/SPO 1101

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang sejarah perkembangan masyarakat, kelompok-kelompok sosial, bentuk-bentuk interaksi, status dan peran, dan kelas sosial. Mata kuliah ini memberikan kerangka konseptual untuk memahami perilaku politik, bukan semata sebagai ekspresi psikologis tapi merupakan hasil proses sosial yang kompleks di masyarakat.

42. Pengantar Antropologi/ SPP 1204

Mata kuliah ini memperkenalkan kepada mahasiswa berbagai konsep dasar seperti pengertian antropologi, ruang lingkup, konsep-konsep kebudayaan, dinamika masyarakat dan kebudayaan, kekerabatan dan kebudayaan (*kinship system*), mata pencaharian (*livelihood*), ekonomi hadiah, monetisasi dan pertukaran, agrikultur, agama dan kebudayaan.

43. Pengantar Politik Digital/ SPP 2160

Media sosial memberikan ruang bernama *cyberspace* untuk mendorong adanya deliberasi nilai-nilai demokrasi dalam kondisi demokrasi kontemporer. Partisipasi, representasi, maupun artikulasi kepentingan kemudian bersinergi dan berkontestasi satu sama lain melalui konten digital sebagai agennya. Dengan kata lain, media sosial telah berperan besar untuk menciptakan kesadaran politik bagi masyarakat. Karenanya, mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa dapat memahami peran *cyberspace* dalam memengaruhi proses-proses politik demokrasi di era digital.

44. Etika Politik/ SPP 2313

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang etika dan fungsi sentralnya dalam ranah kekuasaan. Materi perkuliahan mencakup pembahasan tentang dasar etis dan moral bagi kebaikan bersama, fadsun dan dasar membangun kehidupan politik yang beradab (*political civility*). Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami bahwa perilaku politik memiliki pondasi etis yang bersumber dari nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

45. Perilaku Politik/ SPP 2422

Mata kuliah ini menjelaskan tentang salah satu perspektif dan madzhab penting dalam studi politik yaitu *behavioralism*. Pokok bahasannya mencakup asal usul dan perkembangan behaviorisme, teori pilihan rasional (*rational choice theory*), teori permainan (*game theory*) dan dilema tahanan (*prisoner's dilemma*). Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perilaku politik secara umum dan khususnya aktualisasinya dalam memilih (*voting behavior*).

46. Teori Sosiologi Politik/ SPP 3023

Mata kuliah ini membantu mahasiswa mengetahui dan memahami seluk beluk Ilmu Politik sebagai kajian interdisipliner yang mendapatkan pengaruh dari Ilmu Sosiologi. Sosiologi politik adalah bidang studi yang menjembatani mata rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur dan tingkah laku sosial dengan struktur dan tingkah laku politik. Studi ini akan menemukan keterkaitan dengan variabel sosial dan politik dalam wujud saling keterkaitan antara struktur sosial dan lembaga politik atau antara masyarakat dan negara. Kajian ini penting dalam memahami bagaimana kekuasaan dipahami, digunakan, diorganisasi, disesuaikan dengan latar belakang sosial yang melingkupinya. Seluruh proses tersebut dalam kerangka mempertemukan kesesuaian nilai, sifat serta kepentingan negara dengan masyarakat sipil.

47. Psikologi Politik/ SPP 3050

Mata Kuliah ini didesain agar mahasiswa dapat memahami psikologi politik sebagai sebuah area dalam ilmu sosial yang bersifat interdisipliner yang berusaha untuk menjelaskan perilaku politik melalui prinsip-prinsip psikologi. Melalui kuliah ini, mahasiswa mempelajari akar dari psikologi dan politik termasuk pertanyaan-pertanyaan mendasar yang berhubungan dengan pengertian psikologi, politik, dan penjelasan mengenai hubungan di antara keduanya, yaitu konsep psikologi politik. Selain itu, mahasiswa juga diarahkan untuk memahami karakteristik dan pola-pola perilaku politik berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

48. Antropologi Politik/ SPP 3054

Mata kuliah ini memberikan kepada mahasiswa perspektif lanjutan tentang antropologi dan kaitannya dengan perilaku manusia dalam usahanya mendapatkan, mempertahankan dan memperbesar kekuasaan. Materi kuliah yang diberikan meliputi pendekatan teoretis dalam antropologi untuk menjelaskan kaitan erat antara budaya dan politik, kekerabatan dalam politik, ritual keagamaan dan mistisisme dalam politik, *millenarianism* dan perlawanan, kepemimpinan kharismatik, modernisasi & pembangunan, serta pentingnya pendekatan etnometodologi dan etnografi dalam penelitian antropologi politik.

49. Media dan Pemasaran Politik/ SPP 3057

Mata kuliah media dan komunikasi politik mempelajari perkembangan serta peran, fungsi dan kekuatan media, baik cetak maupun elektronik serta media konvensional, khususnya dalam pembentukan citra, kampanye, dan propaganda maupun pemasaran politik secara umum. Dengan mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisa berbagai perspektif teori tentang media dan pemasaran politik.

50. Konsensus dan Konflik Politik/ SPP 3512

Mata kuliah ini memberikan kepada mahasiswa pengetahuan tentang konsensus dan konflik dan peran penting keduanya dalam membentuk perilaku politik. Dalam proses belajar mengajar, materi yang diberikan mencakup pengertian konsensus dan konflik, tipe-tipe konsensus dan konflik, teori tentang pembentukan konsensus dan konflik.

11.3.4 Kelompok Mata Kuliah Kebijakan Publik**51. Pengantar Studi Pemerintahan/ SPP 1205**

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep dasar dari tata kelola pemerintahan (*governance*), aktor-aktor dalam *governance*, dinamika tata kelola pemerintahan dalam beberapa variannya, dan praktik tata kelola pemerintahan di institusi pemerintahan seperti birokrasi kementerian di pusat dan pemerintah daerah.

52. Pengantar Kebijakan Publik/ SPP 2115

Mata kuliah ini memfokuskan pembahasan pada pendekatan aktor dalam studi kebijakan publik. Dengan pendekatan aktor tersebut, mahasiswa dapat memahami hubungan kebijakan publik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dari perspektif ilmu politik. Oleh karena itu, materi yang diberikan dalam mata kuliah ini lebih terfokus pada pendekatan-pendekatan politik untuk kebijakan publik, model-model kebijakan publik, formulasi kebijakan publik dan aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan, serta kaitan tahapan kebijakan dengan *governance*.

53. Analisis Kebijakan Publik/ SPP 2424

Mata Kuliah Analisis Kebijakan publik memuat materi dasar dalam menganalisa kebijakan publik dengan penekanan pada dimensi politik pada studi kebijakan publik, yaitu *political stream* dalam proses kebijakan mulai dari *agenda setting* hingga evaluasi kebijakan. Materi disampaikan dalam bentuk tatap muka di kelas, diskusi, dan simulasi untuk mempersiapkan mahasiswa mempunyai kemampuan praktis di samping kemampuan teoretis.

54. Politik Pelayanan Publik/ SPP 3041

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pelayanan publik secara teoretis dan praktis. Mahasiswa diberikan materi tentang berbagai teori dan perspektif tentang pelayanan publik (*old public administration, new public management, new public service*). Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik di era demokratisasi di Indonesia, cakupan materi perkuliahan juga meliputi pembahasan tentang pelayanan publik di masa sebelum dan setelah reformasi. Secara praktis, mahasiswa juga diajak untuk melakukan praktikum lapangan untuk melakukan observasi dan evaluasi atas berbagai layanan publik yang diberikan oleh badan/lembaga pemerintah.

55. Politik Agraria dan Pertanian/ SPP 3045

Mata kuliah ini terdiri dari dua pokok bahasan, yaitu pertanahan dan pertanian. Tanah dan pertanian adalah komoditi sekaligus sektor ekonomi yang sangat penting bagi sebuah negara. Pangan dan pertanian menyangkut hajat hidup dan sumber penghidupan orang banyak. Selain itu, komoditi pangan dan sektor pertanian juga menyangkut kedaulatan politik karena kecukupan produksi, keamanan jaringan distribusi dan infrastruktur pertanian menentukan daya saing suatu negara di pasar global. Hal ini membuat komoditi pangan dan sektor pertanian menjadi salah satu yang paling diatur dan diproteksi oleh negara. Beberapa subpokok bahasan di mata kuliah ini antara lain tentang revolusi hijau dan intensifikasi pertanian, nilai tukar petani, swasembada dan kedaulatan pangan, impor bahan pangan, peran Bulog dalam distribusi bahan pangan dan menjaga stabilitas harga, subsidi pangan, pupuk, benih, dan bibit, pembangunan jaringan irigasi, bendungan dan industrialisasi pertanian. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami peran strategis desa bukan saja sebagai sumber bahan pangan dan daerah penyangga untuk pengembangan pertanian tapi juga untuk menjaga stabilitas politik dan sekaligus menentukan bagi jatuh banggunya sebuah rezim pemerintahan.

56. Politik Pariwisata/ SPP 3063

Mata kuliah ini mendeskripsikan tentang konsep dan teori-teori tentang kebijakan pariwisata serta refleksi dimensi politik yang mewarnai perkembangan sektor pariwisata di Indonesia. Beberapa aspek yang dideskripsikan adalah: konsep politik pariwisata, kebijakan pariwisata, ekowisata, dan pengembangan pariwisata serta penyelenggaraannya, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Secara praktis, mahasiswa juga diajak untuk melakukan praktikum lapangan untuk melakukan observasi dan evaluasi atas berbagai kegiatan politik pariwisata yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

57. Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah/ SPP 3527

Mata kuliah ini didesain untuk mempelajari berbagai pemahaman dan teori tentang desentralisasi sebagai model penyelenggaraan pemerintahan. Mahasiswa diajak untuk membahas tentang sentralisasi, dekosentrasi, *medebewind* & *vrij bertuur*, desentralisasi asimetris, dan politik federalism. Mahasiswa juga mempelajari tentang sentralisasi, desentralisasi dan federalisme dalam sejarah Indonesia. Secara lebih dalam, mahasiswa juga diajak untuk menganalisa dinamika desentralisasi, seperti hubungan dan kerjasama antar daerah dan pemekaran daerah.

58. Pembangunan Masyarakat Desa/ SPP 3528

Mata kuliah ini memberikan kerangka teoretis dan konseptual kepada mahasiswa tentang pembangunan masyarakat desa dengan berbagai kompleksitasnya. Materi pembahasan mencakup berbagai teori pembangunan berbasis komunitas (*community development theories*) dan relevansinya dalam pembangunan masyarakat desa. Selain itu, mata kuliah ini juga menjelaskan konsep-konsep tentang pemberdayaan, model-model pemberdayaan, strategi dan tahapan pemberdayaan, penyusunan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman konseptual dan teoretis untuk membuat desain pemberdayaan sederhana berdasarkan analisis persoalan sosial konkret yang berkembang di masyarakat.

59. Politik Anggaran/ SPP 3631

Mata kuliah ini akan memberi bekal pengetahuan kepada mahasiswa tentang seluk beluk politik anggaran dan keuangan daerah. Proses penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah dipahami bukan semata soal teknis dan perencanaan tapi menyangkut aspek politis karena menyangkut relasi kekuasaan antarpihak yang terlibat dalam perumusan dan pengelolaan anggaran. Dari perspektif politik, penentuan skala prioritas dalam proses perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan memengaruhi tingkat akuntabilitas dan kualitas demokrasi. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini mencakup politik perpajakan, sumber-sumber pendapatan negara nonpajak, macam-macam belanja, transparansi anggaran dan kebijakan anti korupsi. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa mampu memberikan evaluasi kritis atas kebijakan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah.

11.3.5 Kelompok Mata Kuliah Perbandingan Politik

60. Pengantar Studi Demokrasi/ SPP 2310

Mata kuliah ini membantu mahasiswa menjabarkan seluk beluk demokrasi sebagai pemikiran politik, tata pemerintahan, dan budaya politik. Selain itu, mata kuliah ini juga mengidentifikasi ragam aktor dan latar politik gerakan demokrasi, tahap dan bentuk transisi demokrasi. Selanjutnya, perkuliahan difokuskan pada kajian fenomenologi tentang kendala-kendala dalam proses transisi demokrasi, kemudian debat antara demokrasi substantif dan prosedural, dan dilanjutkan dengan perkembangan model dan tipe-tipe sistem demokrasi dengan melihat latar belakang pemikiran dan konteks bangsa yang menerapkannya.

61. Teori dan Metode Politik Perbandingan/ SPP 2417

Mata kuliah ini menjelaskan tentang pendekatan dan kerangka teoretis yang dipakai dalam kajian perbandingan politik. Fokus bahasan mencakup perbandingan tentang aspek kelembagaan (misal: parlemen, lembaga eksekutif, dan yudikatif, partai politik, kelompok kepentingan) dan pengaruhnya bagi sistem ekonomi dan model pembangunan yang dijalankan (pasar bebas atau perencanaan terpusat) serta bagaimana nilai budaya dan komposisi etnis/suku memengaruhi budaya politik suatu negara.

62. Nasionalisme dan Etnisitas/ SPP 3038

Mata kuliah ini mencakup dua pokok bahasan, yaitu teori-teori politik tentang nasionalisme dan etnisitas. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian, ruang lingkup, sejarah perkembangan, nasionalisme dan etnisitas. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang tantangan nasionalisme dan etnisitas pada era globalisasi.

63. Militer dan Politik di Negara Berkembang/ SPP 3047

Mata kuliah ini meringkas tema-tema besar dan debat kesarjanaan tentang hubungan sipil dan militer serta pengaruh figur/lembaga militer dalam mendorong atau menghambat demokratisasi di negara-negara berkembang. Mata kuliah ini terdiri dari empat pokok pembahasan utama. *Pertama*, pembahasan difokuskan pada argumen Samuel Huntington tentang profesionalisme militer. *Kedua*, materi mencakup pembahasan tentang kudeta militer dan pemerintahan militer di berbagai negara. *Ketiga*, pembahasan tentang prospek kontrol sipil atas militer di negara-negara yang mengalami perubahan dari rezim otoriter menuju pemerintahan demokrasi. *Keempat*, pembahasan tentang hubungan sipil-militer dalam penerahan kekuatan di masa perang maupun operasi militer di masa damai. Dengan menggunakan perspektif perbandingan, mata kuliah ini akan membahas militer dan politik

khususnya di negara-negara Amerika Latin dan Afrika, meskipun tidak menutup kemungkinan pembahasan juga mencakup militer di negara-negara berkembang lainnya.

64. Agama dan Demokrasi/ SPP 3526

Pandangan esensialis menganggap Islam di dalam dirinya identik dengan nilai otoriterisme, patronase, dan patriarki. Pandangan khas orientalis ini memandang Islam dengan sendirinya tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang menekankan kebebasan, persamaan hak, dan kesetaraan gender. Pandangan ini mulai luntur ketika gelombang demokrasi juga melanda negara-negara Muslim melalui gerakan revolusi musim semi (*spring revolution*) yang terjadi di Timur-Tengah. Oleh karena itu, mata kuliah ini memberikan kepada mahasiswa perspektif politik perbandingan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami dan mampu menjelaskan bahwa demokrasi dan Islam sebagai sebuah sistem nilai tidak memiliki pertentangan satu sama lain. Pembahasan tentang pengalaman demokrasi yang dialami negara-negara dengan mayoritas Muslim akan memperkaya kajian politik perbandingan tentang demokrasi dan manifestasinya yang beragam dalam konteks sosial dan politik yang berbeda.

65. Demokrasi dan Pembangunan Asia Tenggara/ SPP 3525

Asia Tenggara adalah kawasan yang terdiri dari negara-negara dengan sejarah, kebudayaan, sistem politik, dan tingkat pembangunan ekonomi yang beragam. Mata kuliah ini dirancang untuk menjelaskan dan menganalisa keragaman itu dari perspektif perbandingan politik. Dengan pengecualian Indonesia, fokus bahasannya adalah tentang persamaan dan perbedaan negara-negara di kawasan ini dilihat dari tatanan politik dan jalan demokratisasi serta model pembangunan ekonomi yang ditempuh.

11.3.6 Kelompok Mata Kuliah Ekonomi Politik

66. Pengantar Ekonomi Politik/ SPP 1102

Mata kuliah ini membawa mahasiswa untuk memahami konsep dasar ekonomi politik, baik sebagai pendekatan teoretis maupun metode analisis yang menggabungkan penjelasan ekonomi dan politik dan/atau analisis kelas. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan mode analisis ini untuk menjelaskan berbagai kasus/fenomena politik, baik yang terjadi di masa lampau maupun kekinian; baik di Indonesia maupun di negara lain.

67. Ekonomi Politik Pembangunan/ SPP 3021

Mata kuliah ini menjelaskan tentang keterkaitan antara aspek ekonomi dan politik dalam pembangunan atau persoalan *who gets what and how much* dalam proses pembangunan. Problem kemiskinan, hutang, eksploitasi sumber daya alam, lemahnya sumber daya manusia (SDM), dan ketimpangan ekonomi, dipahami sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari dinamika relasi kekuasaan dalam pembangunan. Selain membahas tentang berbagai kebijakan pembangunan dari perspektif ekonomi politik, materi perkuliahan ini juga mencakup hubungan antaraktor, nilai serta kepentingan, proses kreasi, ekstraksi, dan transfer surplus yang terjadi dalam proses pembangunan. Pertanyaan kunci yang ingin dijawab dari mata kuliah ini adalah tentang siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari proses pembangunan.

68. Ekonomi Politik Globalisasi/ SPP 3044

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang dinamika relasi kekuasaan dalam hubungan ekonomi antarnegara. Pokok bahasannya meliputi perspektif teoretis dan pendekatan keserjanaan dalam studi ekonomi politik dan beberapa aspek utama dalam hubungan ekonomi antarnegara seperti perdagangan, keuangan, militer, dan pengetahuan. Mata kuliah ini juga membahas tentang institusi pengaturan ekonomi global seperti IMF, World Bank, WTO dan pengaruhnya dalam mendorong kebijakan penyesuaian struktural di negara-negara berkembang.

69. Bisnis dan Politik/ SPP 3049

Sektor bisnis swasta dan/atau korporasi besar memainkan peran yang makin besar dalam proses politik formal. Kekuatan uang dan modal yang dimilikinya seringkali disalahgunakan untuk membajak proses politik dengan cara membeli pengaruh di kalangan para pengambil kebijakan/politisi, birokrat, dan media. Mata kuliah ini mengulas kerangka konseptual dan perspektif teoretis tentang hubungan antara bisnis dan politik serta kasus-kasus aktual penyelewengan dan korupsi yang dilakukan korporasi baik di Indonesia maupun negara lain.

70. Politik Perburuhan/ SPP 3053

Serikat buruh adalah salah satu kekuatan sosial politik yang berperan penting bagi berjalannya sistem ekonomi pasar kapitalistis. Oleh karena itu, mata kuliah ini memberikan kerangka konseptual dan teoretis untuk menjelaskan peran serikat pekerja/buruh dalam mendorong perubahan sosial dan transformasi ekonomi politik, baik di Indonesia maupun negara lain.

71. Kewirausahaan Sosial Politik/ SPP 3064

Mata kuliah ini dirancang untuk menghasilkan mahasiswa yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan sosial politik, serta mampu melakukan praktik wirausaha sosial politik dengan pemahaman konsep dan praktik wirausaha sosial politik yang komprehensif. Oleh karena itu, mata kuliah ini akan mengarahkan mahasiswa untuk dapat menciptakan inovasi sosial politik yang berorientasi pada peningkatan kemanfaatan publik dan dapat mengimplementasikannya di masyarakat.

11.3.7 Kelompok Mata Kuliah Metodologi Politik**72. Metodologi Ilmu Politik/ SPP 1102**

Mata kuliah ini memberikan kepada mahasiswa pemahaman tentang prosedur atau proses memperoleh pengetahuan politik. Untuk mencapai pemahaman substansi, materi diarahkan pada pandangan dasar dua paradigma utama dalam ilmu politik yaitu positivisme dan nonpositivisme, berbagai perspektif yang berkembang dari kedua paradigma tersebut serta berbagai metodenya. Pemahaman tersebut diwujudkan dalam sebuah rencana penelitian. Dengan demikian, mahasiswa telah siap untuk membuat karya ilmiah/tugas akhir yang sesuai dengan pendekatan metodologi utama yang berkembang dalam Ilmu Politik.

73. Metode Penelitian Sosial/ SPP 2230

Mata kuliah ini dirancang untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar penelitian sosial. Materi yang diberikan meliputi pengertian metode penelitian sosial, aspek kuantitatif maupun kualitatif, teknik pengumpulan

dan pengambilan data, sistem longitudinal, *pilot project*, dan kegunaan praktis metode penelitian sosial.

74. Metode Penelitian Politik 1/ SPP 3035

Mata kuliah ini mempelajari metode penelitian kuantitatif, teknik penelitian kuantitatif dan teknik analisis data kuantitatif serta kegunaannya dalam penelitian/kajian politik. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merumuskan pertanyaan riset kuantitatif yang tepat dan relevan dan mengintegrasikannya untuk menyusun proposal penelitian tugas akhir/skripsi.

75. Metode Penelitian Politik 2/ SPP 3036

Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa tentang metode penelitian kualitatif dan kegunaannya dalam penelitian politik. Materi yang diberikan di antaranya mencakup karakteristik metode penelitian kualitatif, metodologi penelitian kualitatif, dan berbagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merumuskan pertanyaan riset kualitatif yang tepat dan relevan serta mampu menjabarkan rumusan pertanyaan riset itu menjadi proposal penelitian tugas akhir/skripsi.

